



Tranformasi Relawan pada Masa Pemerintahan Jokowi

Voluntarism Transformation during the Reign of Jokowi

1st Jecklin Midiyato Saragih^a, 2nd Yuwanto^b, 3rd Nur Hidayat Sardini^c

^aMagister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Correspondence: jecklinmsaragih@gmail.com

Abstract

This research aims to explore voluntarism transformation for the 2014 and 2019 Presidential Election through Pro-Jo as the largest Joko Widodo's volunteer. This research will explain the fundamental changes of volunteering and the struggle for the interest within political volunteers. This research uses a purposive case study with a qualitative approach. This method is used because it can answer deep question about the transformation and form of volunteers political interest with political elite. The author puts forward a comprehensive explanation rather than just confirming a problem. Meanwhile, the qualitative approach is appropriate for analyzing the phenomenon of events and actions of Joko Widodo volunteer activists. The author found a transformation due to the inclusion of elit interest and political elite in every agenda of the voluntarism movement. Autonomous political participation does not fully work, on the contrary, the participation of volunteer activists was mobilized and controlled by the political elite.

Keywords: Political Voluntarism; Voluntarism Transformation; Pro-Jo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi transformasi voluntarisme Pilpres 2014 dan 2019, melalui gerakan Pro-Jo sebagai barisan relawan terbesar Joko Widodo. Karya ini dimaksudkan untuk menjelaskan perubahan mendasar makna kesukarelawanan dan pertarungan kepentingan di tubuh relawan politik. Penelitian ini menggunakan studi kasus purposive pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini dikarenakan dapat menjawab pertanyaan mendalam tentang transformasi dan wujud politik kepentingan relawan dengan elit politik. Penulis mengedepankan penjelasan komprehensif ketimbang sekedar memberikan konfirmasi terhadap suatu permasalahan. Sedangkan pendekatan kualitatif sangat cocok untuk menganalisis fenomena kejadian dan tindakan aktivis relawan Joko Widodo. Penulis menemukan bahwa terjadi transformasi akibat masuknya kepentingan-kepentingan elit dalam setiap agenda gerakan voluntarisme. Partisipasi politik otonom tidak bekerja secara penuh, sebaliknya yang terjadi partisipasi aktivis relawan telah dimobilisasi oleh elit politik.

Kata kunci: Voluntarisme Politik; Transformasi Voluntarisme; Pro-Jo

I. Pendahuluan

Fenomena relawan politik sebagai bentuk demokrasi partisipatoris dalam kontestasi Presidensial 2014 dianggap sebagai wujud bahwa kemenangan Jokowi-JK adalah kemenangan rakyat Indonesia. Fenomena ini memiliki efek dan pengaruh yang signifikan terhadap kontestasi Presidensial di Indonesia, terutama pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 dan 2019. Penelitian ini ingin melihat secara langsung relawan politik yang awalnya hanya sebagai kelompok masyarakat yang tergerak untuk mendukung Partai Politik atau bakal calon yang dipandang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, kemudian berbalik menjadi kekuatan politik baru. Penelitian ini juga akan melihat implikasi dari kemunculan relawan politik sebagai kekuatan politik baru terhadap Partai Politik sebagai lembaga yang memiliki legitimasi formal untuk memperebutkan kekuasaan dan mengisi jabatan politik.

Hampir satu dekade terakhir kampanye dalam kontestasi politik tidak hanya diramalkan oleh keberadaan kandidat/calon, Partai Politik, atau tim kampanye melainkan diisi pula

oleh kehadiran kelompok sipil pendukung salah satu calon yang mengorganisir diri dalam bentuk relawan. Istilah relawan (*volunteer*) dalam historiografi politik dikembangkan semenjak tahun 1755 oleh seorang Perancis M. Fr Voluntaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang berperang. Istilah relawan diambil dari bahasa Jerman "aktivismus" yang muncul pada akhir perang dunia pertama. Istilah ini kemudian digunakan untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Biasanya *aktivismus* dihubungkan dengan Kurt Hiller, pengarah organisasi *Neuer Club* yang menaungi para penyair ekspresionis awal, maupun Franz Pfemfert, pendiri majalah *Die Aktion* pada 1911 yang sangat politis. Dalam berbagai pengertian tersebut, kaum militan maupun *aktivismus* akhirnya dapat dikatakan sebagai bagian dari relawan (*volunteer*) (Heryanto, 2019: 159).

Puncak popularitas relawan politik terjadi pada Pilpres tahun 2014, peran relawan Jokowi berhasil mengantarkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Namun, kehadiran relawan politik pada kontestasi presidensial 2014 berbeda dengan sejarah awal kelahiran voluntarisme tersebut. Sebab relawan politik pada kontestasi presidensial 2014 bukan bagian dari anggota Partai Politik. Para relawan hadir bukan karena daya tarik pada salah satu Partai Politik, melainkan kepada politik nilai yang ingin diperjuangkan melampaui kepentingan Partai Politik.

Penempatan elit relawan politik pada jabatan tertentu seperti Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga jabatan Menteri dapat menjelaskan bahwa relawan politik hari ini berperan sebagai pijakan untuk mengisi jabatan politik, layaknya tujuan sebuah Partai Politik. Hal ini dapat dilihat pasca pilpres 2014, beberapa nama yang dianggap memiliki peran penting dalam pemenangan pasangan Joko Widodo Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapatkan jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya : (1) Hilmar Farid, adalah seorang yang dikenal sebagai budayawan dan sejarawan merupakan salah satu elit relawan politik Jokowi yang mendapatkan jabatan sebagai Komisaris Independen di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sebelumnya ia merupakan Ketua Panitia Simposium Sekretariat Nasional Jokowi. Dia juga mendukung Jokowi sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 dengan mendirikan Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB). (2) Dyah Kartika Rini, merupakan pendiri Jokowi Ahok Social Media Votunteers (JASMEV), jaringan relawan Jokowi saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dan berlanjut sebagai relawan politik pada pemenangan Pilpres 2014. Pasca kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 dia mendapatkan jabatan di salahsatu perusahaan plat merah sebagai Komisaris Independen PT Danareksa (Persero) sejak Oktober 2015. Selain Hilmar Farid yang memiliki latar belakang dari relawan Seknas Jokowi dan Dyah Kartika Rini dengan latar belakang dari relawan JASMEV beberapa elit relawan lainnya juga mendapat bagian untuk duduk di kursi Komisaris BUMN, diantaranya :

Tabel 1.1 Relawan Jokowi-JK di Kursi Komisaris BUMN

NO	NAMA	LATAR BELAKANG RELAWAN	POSISI
1	Paiman Rahardjo	Rumah Koalisi Indonesia Hebat	Komisaris Perusahaan Gas Negara
2	Pataniari Siahaan	Tim Cemara 19	Komisaris Independen BNI
3	Goei Siau Hong	Pro Jokowi (Projo)	Komisaris Bank Mandiri
4	Hironimus Hilapok	Duta Jokowi	Komisaris Independen Adhi Karya

Sumber: Olahan data peneliti, 2023

Tidak berhenti pada posisi Komisaris BUMN, pasca Pilpres 2019 elit relawan politik Pro-Jo berhasil duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju yang di pimpin oleh Presiden Joko

Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada tanggal 25 Oktober 2019 melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 ketua umum Pro-Jo Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada *reshuffle* atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 17 Juli 2023 dua elit relawan politik kembali mendapatkan posisi, dimana Budie Arie Setiadi yang semula menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi resmi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johny G Plate dari Partai Nasdem yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan BTS 4G. Elit relawan politik lain yakni Paiman Raharjo yang merupakan ketua umum Relawan Sedulur Jokowi juga mendapatkan posisi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggantikan Budi Arie Setiadi ketua umum Pro-Jo.

Relawan politik sejatinya memiliki tugas utama meneliti sebab-akibat dari kinerja kebijakan dan program publik, sehingga relawan politik dapat terus mengawal apakah suatu kebijakan publik yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang atau hanya diputuskan sepihak untuk memenuhi kepentingan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap berada pada posisi ektra-parlementer sebagai pengawas dan penyeimbang. Apabila relawan politik memiliki peran ganda sebagai intra-parlementer dan sekaligus ektra-parlementer akan menjadi problematika di masa yang akan datang, karena pada hakikatnya peran relawan politik adalah pengawal suara rakyat.

Penelitian ini bisa melihat tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh relawan politik yang masih aktif pasca kontestasi presidensial berlangsung. Apakah tindakan relawan politik Pro-Jo yang berhasil mengantarkan ketua umumnya menduduki jabatan politik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika masih dalam batasan tujuan dibentuknya sebuah relawan politik. Jawaban tersebut bisa ditemui di akhir penelitian ini.

II. Tinjauan Pustaka

Keberadaan voluntarisme merupakan bentuk kegiatan kesukarelawanan, yang sedang berlangsung, terencana, dan tindakan yang secara bebas dipilih untuk mempromosikan kepentingan publik. Perilaku pro sosial yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberi manfaat bagi orang lain, yang tidak membutuhkan kompensasi keuangan (Clary, et al., 1998: 1516-1530 ; Mowen & Sujan, 2005: 170-182 ; Penner, 2002). Dalam konteks informal relawan menitikberatkan pada kegiatan disposisi seperti menolong atau berempati (Finkelstein & Brannick, 2007).

Karakteristik kelompok relawan informal dalam lingkungan sosial kemasyarakatan terjadi berdasarkan pengorganisasian kasual yang sering kali berasal dari ikatan hubungan yang kuat (Amato, 1990). Berdasarkan sifatnya yang informal jumlah sukarelawan hanya dapat diperkirakan, karena beberapa bentuk kegiatan sukarela tidak dilembagakan. Keterlibatan relawan sejatinya tidak berkuat pada kegiatan kemanusiaan semata dalam mencapai kesejahteraan bersama. Sejatinya setiap masyarakat yang dibentuk senantiasa bertindak untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang mereka anggap baik.

Voluntarisme merupakan upaya membangun koneksi antar warga Negara dengan konsep kewarganegaraan aktif. Target mereka bukan untuk menumbuhkan hak sipil tetapi untuk merangsang aktivitas sosial (Pecnikova, 2016: 1238). Relawan jenis ini bergerak meliputi beberapa indikator dari kesukarelaan, yakni : perilaku berkehendak bebas, tanpa imbalan, bertujuan membantu orang lain atau penerima manfaat, dan atas dasar jangka panjang pengaturan informal (Levanthal, 2009).

Basis kekuatan voluntarisme yang disandarkan pada kedekatan emosional dengan modal sosial yang kuat, menghasilkan komposisi keanggotaan relawan politik yang biasanya terdiri dari unsur-unsur diluar Partai Politik, sebagai gerakan politik non elitis, non partisan, berdaya secara mandiri, dan bergerak secara masif dan dinamis, dengan satu karakter utamanya : mampu berpartisipasi secara politik tanpa Partai Politik (Alam, Arditama, & Sefyono, 2017: 141-142). Peningkatan peran relawan bukan dari anggota formal Partai Politik telah memberikan efek untuk menghasilkan kampanye yang kuat. Hal ini dikarenakan keberadaan relawan non anggota Partai Politik dapat terbentuk dari beraneka ragam latar belakang, demi tercapainya keseimbangan dalam kegiatan kesukarelawanan (Fisher, Fieldhouse, & Cutss, 2014: 77-85).

Keberadaan relawan politik merupakan adanya pergeseran cara pandang untuk meninggalkan cara-cara kampanye tradisional seperti penyebaran poster, selebaran, dan pembuatan baliho-baliho di ruang-ruang publik yang bersifat umum. Kampanye model tradisional tersebut justru tidak menyentuh *voters* secara keseluruhan. Perkembangan teknologi dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan cara-cara kampanye tradisional, yang dinilai menghasilkan pembiayaan yang tinggi saat Pemilu. Menggerakkan kader-kader Partai Politik mengharuskan Partai Politik memberikan kebutuhan logistik pada proses tahapan-tahapan Pemilu (Fisher & Denver, 2009: 196-210).

Beban biaya yang terlalu berat untuk dipikul oleh Partai Politik dalam kampanye tradisional, menciptakan ruang baru untuk melibatkan masyarakat dalam mempromosikan pembangunan masyarakat sipil. Tanpa mereka harus bergabung sebagai anggota formal Partai Politik atau menanggung stigma-stigma negatif publik atas Partai Politik (Lay, 2017: 9-10).

Pembahasan tentang relawan politik pada umumnya menyoroti relawan politik sebagai gerakan sosial politik yang bersifat partisipatoris. Purboningsih (2015), Arianto (2014), Syauket (2022), Jati (2016), Hamdani, Herdiansyah, dan Bintari (2021) yang menyebutkan bahwa relawan politik hadir sebagai bentuk dari peningkatan partisipasi politik oleh publik. Latarbelakang terbentuknya relawan politik dipicu oleh kesamaan kekaguman terhadap tokoh terkait, baik dilihat dari program kerja ataupun dari visi misi tokoh tersebut. Relawan Politik sebagian besar berasal dari kelas menengah urban yang kritis terhadap politik, transformasi kelas menengah menjadi kelas politis merupakan bagian untuk meruntuhkan hegemoni elite yang selama ini berkuasa di pemerintahan. Fenomena relawan politik dalam kontestasi Presidensial dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politis yang bernuansa patrimonial, oligarkis, menuju voluntarisme dan partisipatoris.

Arianto (2016) membagi tipologi relawan politik yaitu relawan komunitas yang terorganisir serta memiliki struktur dan relawan non komunitas yang bergerak secara personal. Sementara, Maharddhika (2017) menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai relawan politik menjadi 2 jenis yaitu partisan dan non partisan yang keduanya dibedakan berdasarkan relasi dengan kandidat. Non partisan dimaknai sebagai relawan yang tidak terlibat dalam pemenangan kandidat, sedangkan partisan adalah relawan yang terlibat aktif dalam upaya pemenangan kandidat.

Putra, Hertanto, dan Warganegara (2022) memaknai bahwa relawan politik tidak hanya sebatas peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk voluntarisme dan partisipatoris, tetapi juga bentuk pragmatisme dari adanya kebutuhan tokoh politik terhadap jasa marketing politik yang ditawarkan relawan politik guna memaksimalkan potensi pemenangan. Relawan politik juga dianggap berperan sebagai broker dalam relasi klientelistik dengan kandidat guna membangun citra baik dimata masyarakat pad

segmentasi tertentu dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitas serta membangun basis massa pendukung.

Dari berbagai penelitian yang telah dibahas sebelumnya, belum peneliti temui hasil penelitian di bidang ilmu politik tentang relawan politik yang membahas secara mendetail mengenai relawan politik sebagai kekuatan politik baru terhadap interelasi politik relawan politik dengan Partai Politik. Sehingga penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti yakini memiliki sesuatu yang baru (*novelty*) untuk dikaji lebih mendalam sebagai syarat suatu karya ilmiah, yakni sesuatu yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

III. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe purposive untuk pemilihan informan penelitian dengan mempertimbangkan peran jabatan.

Jangkauan penelitian merupakan batasan untuk membatasi analisis dalam penelitian (Akunto, 1998). Penelitian ini, sesuai dengan tema dan judul, maka subjek utama untuk dilakukan wawancara ialah Dewan Pimpinan Pusat Pro-Jo dan beberapa narasumber yang dianggap dapat mendukung isi dan hasil penelitian kali ini.

Dalam penelitian ini menggunakan data yang digunakan yang data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang disajikan dalam bentuk kata verbal yang akan membentuk teks dengan rangkaian kata, frasa, dan kalimat dan bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996:2).

Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas dan lebih terperinci berdasarkan fenomena yang dialami informan mengenai bagaimana relawan politik bertransformasi sebagai sebuah kekuatan politik baru. Seberapa pentingkah relawan politik hadir sebagai institusi demokrasi alternatif. Bagaimana dampaknya bagi praktik demokrasi di Indonesia. Apakah relawan politik merupakan kekuatan politik baru.

Peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian, mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih maksimal dan sesuai dengan fenomena yang dialami oleh informan.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut :

- (1) Sumber Data Primer, Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber primer, yakni informan utama atau narasumber. Data primer ialah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2009). Sumber data primer diperoleh melalui proses wawancara maupun penyebaran kuesioner kepada informan. Informan adalah orang yang diminta keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, dan keterangan yang diperoleh dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket atau lisan maupun saat menjawab wawancara. Informan dalam penelitian ini Sekretaris Jendral Pro-Jo, Dewan Pimpinan Pusat Pro-Jo, dan Akademisi atau Pengamat Politik yang memiliki kemampuan dalam memahami topik penelitian ini.

(2) Sumber Data Sekunder, Tidak hanya lisan maupun tulisan dari para informan yang termasuk ke dalam data primer, tambahan seperti dokumen juga merupakan sumber data. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah AD ART Pro-Jo, beberapa literasi seperti jurnal, artikel dan tulisan-tulisan di internet lainnya, yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian kali ini.

IV. Pembahasan

Aktivitas Relawan Politik Sebelum Dan Pada Saat Kontestasi Presidensial

A. Penggalangan Massa

Sebelum Jokowi mendeklarasikan diri maju sebagai calon Presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, beberapa orang sudah mengorganisir kelompok-kelompok relawan. Kelompok inilah yang dengan agresif bermanuver dengan segala cara seperti aksi massa, aksi simpatik, advokasi hingga pembentukan opini di media untuk mendukung pencapresan Jokowi (Projo, 2017).

Kelompok-kelompok relawan bergerak secara riil mengorganisasikan rakyat secara nasional. Terdapat beberapa relawan-relawan yang agresif mendukung dan berusaha memenangkan Jokowi, diantaranya adalah Pro Jokowi (Pro-Jo), Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi), dan Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP-2014). Belum lagi penggalangan massa dilakukan relawan di media-media sosial atau media mainstream oleh Jokowi Advance Social Media Volunteers (Jasmev) (Projo, 2017).

Selain mengorganisir penggalangan massa, relawan politik juga memiliki pekerjaan rumah untuk menekan Partai Politik agar mencalonkan Jokowi. Bersama relawan Pro-Jo, Budi Arie Setiadi mengorganisasikan gerakan rakyat untuk mendukung kemenangan Jokowi. Tidak hanya berkampanye membentuk opini publik, gerakan relawan itu termasuk beberapa ormas lain juga gencar mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk merestui Jokowi maju dalam Pilpres 2014.

Leo Agustino (Wawancara, 08 Maret, 2024) menyatakan bahwa relawan menyadari relawan tidak bisa mengantarkan Pak Jokowi menjadi calon Presiden karena peraturan Undang-undang. Seseorang yang mau menjadi calon Presiden harus melalui jalur Partai Politik. Sehingga relawan mempengaruhi Partai Politik, apabila Partai Politik memilih Jokowi maka kami yang akan mendukung dan memenangkannya.

Pada Rakernas III PDI Perjuangan di bulan September Tahun 2013, PDI Perjuangan belum menentukan nama calon Presiden yang akan diusung oleh partai berlogo banteng tersebut. Dalam 17 rekomendasi hasil Rakernas III PDI Perjuangan Tahun 2013 pada poin 17 disebutkan bahwa :

“Merekomendasikan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan agar pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai”

Secara umum konstelasi politik internal PDI Perjuangan menjelang Pilpres 2014 memang tak mendukung pencapresan Jokowi. Kader PDI Perjuangan mayoritas menempatkan Megawati sebagai patron tunggal, yang wibawa kemepimpinannya belum dapat digantikan oleh tokoh senior maupun kader-kader PDI Perjuangan lainnya. Sehingga kemunculan Jokowi dalam percaturan Pilpres 2014 merupakan salah satu ancaman keharmonisan PDI Perjuangan kala itu. Kekhawatiran adanya perpecahan di internal PDI Perjuangan adalah,

ketika dua dukungan suara ini tidak mencapai titik temunya. PDI Perjuangan sejatinya tidak menginginkan sejarah kelam terulang. Sejarah kelam yakni adanya konflik internal, yang pada akhirnya menghasilkan perpecahan yang tidak berkesudahan di partai berlogo banteng itu.

Mereka yang menduduki jabatan struktural DPP PDI Perjuangan memang berupaya menghadang relawan Jokowi. Kondisi ini dikonfirmasi oleh politikus PDI Perjuangan Eva Sundari. Para elit PDI Perjuangan cenderung memasang Megawati dan Jokowi sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Eva Sundari juga dianggap membangkang terhadap perintah partai karena menggelar konsolidasi dengan relawan Jokowi (Projo, 2017).

Kesulitan meraup dukungan dari elit PDI Perjuangan tidak membuat semangat relawan pendukung Jokowi menjadi surut. Relawan pendukung Jokowi terus bekerja keras memperluas basis gerakannya sembari berharap konstelasi di internal DPP PDI Perjuangan bakal terseret arus gerakan massa rakyat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Handoko (wawancara, 07 November, 2023) yang membenarkan kerja pertama dari Pro-Jo adalah mendesak ibu Megawati sebagai pemegang hak prerogatif di PDI Perjuangan untuk mencapreskan Joko Widodo dari PDI Perjuangan, karena relawan menyadari yang bisa mencalonkan Presiden hanyalah partai.

Hal tersebut diperkuat oleh Ayub Purnomo (wawancara, 21 November, 2023) yang mengatakan bahwa tanpa keterlibatan bapak Almarhum Gunawan Wirosaroyo yang mendatangi ibu Megawati di teuku umar, gerakan relawan Pro-Jo yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi tidak akan diperhitungkan oleh ibu Megawati.

Namun, fakta lain peneliti temui seorang sosok yang mempengaruhi sikap Megawati mencalonkan Jokowi sebagai Presiden. Bukan hal gampang menaklukkan prinsip Megawati yang dikenal kokoh pendiriannya. Pada Maret Tahun 2014, Megawati bertemu dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Anak Agung Ngorah Oka Ratmadi. Tokoh politik Bali yang akrab disapa Tjok Rat itu adalah loyalis Megawati. Usai pertemuan dengan Megawati, Tjok Rat menebar keyakinan bahwa Jokowi dipastikan maju menjadi calon Presiden dari PDI Perjuangan (Projo, 2017).

Pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati mengeluarkan mandat kepada Jokowi sebagai calon Presiden dari PDI Perjuangan. Jokowi ditugaskan untuk mengkampanyekan PDI Perjuangan dalam kemenangan Pemilihan Legislatif yang berlangsung 9 April 2014. Jokowi yang dianggap sebagai calon Presiden yang memiliki dukungan penuh dari akar rumput diharapkan dapat memberikan efek elektoral kepada PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 (Projo, 2017).

Fenomena ini merupakan sebuah gejala demokrasi patronase (Klinken, 2014). Tetapi dengan adanya relawan politik dapat dijadikan sebuah penanda akan kelahiran berbagai aktor demokrasi yang mampu meruntuhkan model politik Indonesia yang berbasis patronase.

Fenomena voluntarisme politik yang dilakukan oleh relawan politik pada masa awal merupakan momentum yang baik bagi demokrasi. Hal ini sejalan dengan Leo Agustino (wawancara, 08 Maret, 2024) yang menyatakan demokrasi seharusnya menciptakan sebuah keinginan demos yang kemudian di artikulasi oleh para elit politik untuk kemudian diperjuangkan.

Bagi relawan, untuk memenangkan Jokowi tidak ada cara lain kecuali melakukan gerakan langsung ke masyarakat dari pintu ke pintu. Kampanye model ini meski sangat menguras energi namun dibutuhkan rakyat agar mereka bisa menilai sosok Jokowi dan programnya

melalui sosialisasi yang dilakukan. Pro-Jo mencetak lebih dari 100 ribu banner Posko Rakyat Jokowi. Gerakan rakyat yang masif dan menyentuh perkampungan dan gang-gang kecil diseluruh Indonesia dianggap efektif untuk melakukan sosialisasi. Mendatangi langsung konstituen membuat dapat meyakinkan rakyat bahwa Jokowi-JK adalah sosok pemimpin yang bersih, tidak korupsi sekaligus bukan pelanggar HAM (Projo, 2017).

Pada saat Pilpres 2014, Pro-Jo membentuk tim pengawal TPS yang berslogan “Lawan Pilpres Curang”. Lebih dari 400 ribu relawan Pro-Jo siang dan malam menjaga TPS di seluruh Indonesia. Di Riau, Soni Silaban Ketua DPD Pro-Jo Riau memerintahkan semua relawan Pro-Jo untuk selalu mengawasi gerak-gerik mobil yang berisi uang untuk serangan fajar (Projo, 2017).

Fenomena relawan politik merupakan episode awal dari efek kemunculan esensi demokrasi yang menyerupai kelompok penekan pada era 1998-an (Uhlen, 1998). Hal ini dapat dilihat dari fenomena saat berlangsungnya kontestasi Presidensial Tahun 2014, beragam modalitas sosial seperti komunitas sepeda onthel, komunitas layang-layang, pedagang pasar, dan komunitas seniman berubah menjadi modalitas politik dalam barisan relawan politik. Relawan politik adalah perwujudan awal dari semangat kewarganegaraan yang tumbuh secara kolektif dan bergerak bersama-sama dalam sifat yang politis.

Kemampuan Pro-Jo dalam melakukan penggalangan massa dan menjadi salah satu alasan PDI Perjuangan dalam mengeluarkan mandat kepada Jokowi sebagai calon Presiden dari PDI Perjuangan tidak terlepas dari profil para pendiri Pro-Jo yang rata-rata adalah kader senior PDI Perjuangan atau Aktivistis Mahasiswa 1998. Beberapa nama pendiri Pro-Jo yang peneliti temui adalah Gunawan Wirosaroyo, merupakan seorang politis senior PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Periode 2000-2005. Agnita Singedikane dan Imam Mundjiat yang merupakan kader senior PDI Perjuangan dari Kalimantan Timur. Beberapa nama mantan aktivis mahasiswa 1998 juga masuk dalam daftar nama para pendiri Pro-Jo Budi Arie Setiadi, Dhani Marlene, Waway, Fahmi Alhabsyi, Jonacta Yani, Firmansyah, dan Soni. Dapat disimpulkan bahwa latarbelakang para pendiri Pro-Jo menjadikan Pro-Jo sebagai relawan yang memiliki pengaruh politik dan kemampuan dalam melakukan penggalangan massa.

B. Penggalangan Dana

Pemilu ke pemilu uang tunai berseliweran di masyarakat dari para calon untuk “membeli” suara rakyat. Ada yang mengistilahkan “serangan fajar” karena dilakukan pada dini hari di hari pencoblosan, ada yang menyebut dengan “gizi” karena nilai uang yang dibagikan bisa menambah semangat akibat penambahan “gizi” tersebut.

Herbert E. Alexander dalam bukunya *Financing Politics : Money, Election, and Political Reform* (1991) menyatakan bahwa uang merupakan alat terpenting untuk mencapai kekuasaan politik dalam masyarakat modern (kontemporer). Menurutnya, dalam semua masyarakat uang merupakan sarana penting yang dapat digunakan untuk memperoleh energi dan sumber daya. Ciri khas uang adalah dapat dipindahkan dan diubah tanpa mengungkapkan asal-usulnya. Ini adalah keuntungan yang sangat nyata dalam politik (Alexander, 1991: 2). Uang memiliki arti penting dalam mempengaruhi proses politik, karena uang dapat diubah menjadi sumber daya lain untuk mendapatkan pengaruh politik (Alexander, 1991: 4).

Praktek politik uang tersebut ingin diredam oleh para relawan pada Pilpres 2014, Jokowi seolah “dibeli” oleh rakyat melalui penggalangan dana secara sukarela kepada pasangan calon Jokowi-JK. Rekening yang dibuka untuk menampung dana sukarela kepada pasangan

Jokowi-JK setiap hari “disatroni” 1.000 sampai 2.000 transaksi kiriman uang, baik berupa setoran tunai maupun transfer menggunakan ATM (Samah & Susanti, 2011: 79).

Biasanya rencana penggalangan dana dilakukan secara sistematis seperti menetapkan tujuan penggalangan dana, taktik dan strategi perencanaan untuk menjangkau donor pendanaan, menetapkan batas waktu, hingga membangun jaringan kepada para pendonor pendanaan untuk dapat dijangkau. Rangkaian kegiatan penggalangan dana tersebut biasanya dikenal dengan istilah fundrising. Istilah fundrising berasal dari Amerika Serikat yang artinya menghasilkan atau menghimpun dana secara sukarela baik dalam bentuk uang ataupun sumber daya lain dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah.

Di Amerika Serikat kandidat yang mencalonkan diri untuk meraih jabatan politik lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jaringan kewirausahaan (Bonica, 2017:154) karena kandidat diharapkan dapat memperoleh uang dengan jumlah besar yang dapat digunakan untuk membangun kampanye mereka sendiri. Kemampuan menggalang dana sejak awal sering dianggap sebagai prasyarat untuk sebuah kampanye layak tidaknya seorang kandidat yang sedang mencalonkan diri. Sehingga banyak kandidat yang gagal disebabkan karena tidak berhasil dalam proses penggalangan dana awal.

Bonica (2017) mendeskripsikan tentang hubungan antara kesuksesan kandidat dalam melakukan fundrising di awal dengan kesuksesan kandidat tersebut memenangkan Pemilu. Ada tiga tahapan yang harus ditempuh oleh para kandidat dan Partai Politik. Pertama, fundrising di awal, fundrising di awal merupakan wujud dari kampanye di awal yang dapat dilakukan kandidat sekaligus menghimpun dana kampanye sebelum kandidat lain melakukan hal yang sama. Kedua, fundrising lewat personal circle, personal circle yang dimaksud adalah anggota keluarga, teman, dan kolega profesional dari kandidat. Ketiga, fundrising lewat jaringan profesional. Jaringan profesional yang dimaksud adalah jaringan teman sejawat dari kandidat, yang memiliki profesi yang sama dengan kandidat.

Wujud partisipasi politik berupa fundrising yang dilahirkan oleh relawan politik dimanifestasikan dalam bentuk sumbangan dan donasi pada rekening dana kampanye Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Melalui Rekening BRI kantor cabang Mall Ambassador dengan nomor rekening 12230100172309 atas nama Joko Widodo - Jusuf Kalla (Tempo, 2014). Gerakan donasi dana kampanye Jokowi-JK dilakukan oleh para relawan dengan harapan publik mampu ikut berpartisipasi dan bergotong royong menjadikan Jokowi-JK sebagai pemimpin sejati. Setiap sumbangan yang diberikan, berapapun nilainya, tetap dimaknai sebagai bentuk keinginan rakyat untuk terlibat dalam menentukan pilihannya (Arianto, 2014).

Pengelolaan dana sumbangan kampanye ini dilakukan secara transparan dengan membuat website www.jokowi-jk-kita.com. Situs web ini selalu memutakhirkan data perolehan sumbangan dari masyarakat. Dana partisipasi yang dihimpun oleh relawan adalah dana yang masuk ke rekening baik yang berasal dari perorangan, perusahaan, maupun Partai Politik. Sebelum rekening dana kampanye ditutup, tercatat ada 16 perusahaan yang memberikan sumbangan. Sesuai peraturan, maksimal sumbangan yang diperbolehkan diberikan oleh perusahaan adalah Rp 5 miliar (Samah & Susanti, 2011: 84).

Tercatat sumbangan dana kampanye mencapai Rp 312.376.119.823. Rinciannya, dana terpakai Rp 311.899.377.825. Sumbangan dari Partai Politik pendukung Rp 206.531.657.775, sedangkan yang berasal dari masyarakat mencapai Rp 105.844.462.048, yang terdiri dari dua sumber yakni perusahaan dan perorangan. Dari perusahaan Rp 63,1 miliar dan perorangan Rp 42.744.462.048. Uniknyanya dari perorangan berasal dari 60.000 orang dan terdapat 59.000 penyumbang yang memberikan sumbangan dibawah Rp 100.000 (Qodir, 2014).

Setiap sumbangan yang diberikan, berapa pun nilainya dimaknai sebagai bentuk keinginan rakyat untuk ikut terlibat dalam menentukan pilihannya. Datang pada saat pemungutan suara dan mencoblos Jokowi-JK saja sudah merupakan kontribusi yang luar biasa bagi kemenangan Jokowi-JK. Apalagi kalau mereka bukan hanya mau mencoblos tetapi juga mau menyisihkan sedikit uang yang mereka miliki untuk kemenangan pemimpin rakyat.

Yoko Santoso, entrepreneur asal Yogyakarta mengaku mentransfer ke rekening gotong royong sebesar Rp 1 Juta. Ia juga mendorong teman-teman dan saudara-saudaranya untuk melakukan hal yang sama. Ada di antara mereka yang mentransfer lebih banyak tetapi ada juga yang lebih sedikit. Dukungan uang juga disampaikan pemilik akun facebook Triyono Sigit yang mengirim uang ke rekening BCA Joko Widodo senilai Rp 222.222. Dalam status facebook-nya, ia menulis “Hari ini baru saya sempat untuk berkontribusi ke rekening Joko Widodo / Jusuf Kalla dengan nomor rekening BCA 5015500015”. Pemilik akun facebook Bumikecil Ririn Sefsani mengunggah bukti transfer ke rekening Jokowi-JK sebesar Rp 270.000 di halaman facebook-nya. Dalam status facebooknya ia menulis, “Saya Ririn Sefsani, donasi 270.000 rupiah untuk mendukung kampanye Capres saya Jokowi-Jusuf Kalla. Pilihan 270.000 bukan tanpa makna, Angka 2 (dua) victory untuk capres yang saya coblos di 9 Juli 2014 dan Angka 7 (tujuh) saya akan menghantarkan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia” (Samah & Susanti, 2011). Fenomena penggalangan dana dari relawan juga merupakan sejarah pertama dalam kontestasi Presidensial di Indonesia, Jokowi merupakan calon Presiden pertama yang melakukan penggalangan dana kampanye yang bersumber dari relawan (Mietzner, 2014).

Hal ini akan mengkonfirmasi bahwa relawan politik terlahir dari kejenuhan atas mengguritanya praktik-praktik klientelistik atau yang dikenal patronase. Defisit demokrasi kerap membuat rakyat diperdaya oleh kepentingan para oligarkis. Namun kehadiran relawan politik telah membuktikan jika kedaulatan rakyat tidak bisa dibeli oleh politik uang. Bahkan, relawan politik sebagai saluran partisipatoris baru ini telah mampu menghambat peredaran politik uang (Hidayat, 2009).

Politik transaksional seperti sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Indonesia di era reformasi. Pilpres 2014 memberikan warna baru terhadap politik Indonesia yang sudah tercemar oleh politik transaksional yakni adanya wujud partisipasi dari masyarakat berupa sumbangan dana kampanye kepada Jokowi-JK. Tujuan dari donasi tersebut tidak lain adalah sebagai upaya melibatkan masyarakat secara langsung dalam kampanye Jokowi-JK. Setiap sumbangan yang diberikan, berapa pun nilainya, tetap dimaknai sebagai bentuk keinginan rakyat untuk terlibat dalam menentukan pilihannya dan pengelolaan dana sumbangan kampanye ini dilakukan secara transparan melalui website www.jokowi-jk-kita.com.

C. Penggalangan Isu

Selama 31 Tahun, *the Jakarta Post* tidak pernah secara terang-terangan bersikap mendukung kandidat manapun yang maju dalam Pemilu. *The Jakarta Post* selalu berusaha berdiri ditas keributan politik, namun tidak dalam Pilpres 2014. Jokowi dianggap mempunyai potensi yang lebih besar untuk memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan yakni pluralisme, hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan reformasi. Sikap dukungan yang diambil *the Jakarta Post* ini muncul di tengah pemberitaan media-media televisi yang berpihak kepada salah satu calon, yang meninggalkan prinsip dasar jurnalisme soal akurasi dan keberimbangan. Kekhawatiran akan meledaknya konflik horizontal yang dipicu sentimen SARA pasca beredarnya tabloid *Obor Rakyat* juga menjadi landasan *the Jakarta Post* menentukan sikap pada Pilpres 2014 (Samah & Susanti, 2011).

Endorsement yang dilakukan oleh *the Jakarta Post* juga pernah terjadi di Negara lain, *The Economist* sebuah media ternama di Inggris juga merupakan salah satu media yang menyatakan dukungannya terhadap salah satu kandidat Perdana Menteri di Negara tersebut. Bahkan *the economist* juga menyatakan dukungannya terhadap kandidat tertentu dalam Pemilu yang digelar Negara lain.

Pada kontestasi Presidensial Tahun 2014 publik digemparkan oleh kehadiran kampanye hitam melalui tabloid bertajuk *Obor Rakyat*. Melalui tabloid *Obor Rakyat* Jokowi-Jusuf Kalla diserang oleh beberapa isu seperti capres boneka, keturunan cina, hingga antek zionis atau Amerika Serikat.

Isi tabloid yang sempat beredar sebanyak empat edisi ini adalah serangan terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla yang tak didukung data akurat dan tak menyediakan ruang konfirmasi bagi pihak yang diserang. Dicitak dalam jumlah ribuan, mencapai 100.000 dan tabloid ini dikirim ke sejumlah pesantren terutama pesantren milik Nahdlatul Ulama yang menjadi basis dukungan Jokowi baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Meski pemimpin redaksi *Obor Rakyat* Setyardi Budiono mengatakan bahwa yang mereka hasilkan adalah sebuah produk jurnalistik, namun Dewan Pers menyebut bahwa *Obor Rakyat* tidak memiliki syarat faktual sebagai produk jurnalistik. Menariknya, meski penggagas *Obor Rakyat* Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyosa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri namun tabloid *Obor Rakyat* edisi ke-4 masih bisa terbit dengan judul cover “JK Sogok Mega 10 Triliun” (Samah & Susanti, 2011).

Dengan munculnya tabloid bertajuk *Obor Rakyat*, relawan segera melawan kampanye hitam yang diarahkan kepada Jokowi-Jusuf Kalla dengan cara menerbitkan sejumlah tabloid seperti *Suara Kita*, *Jokowi-JK adalah kita*, *Obor Rahmatan Lil’alamin* dan *Pelayan Rakyat* untuk meyakinkan rakyat agar tidak mempercayai tuduhan-tuduhan palsu yang diarahkan kepada Jokowi (Projo, 2017).

Relawan Politik pendukung Jokowi-JK juga memiliki metode lain dalam menepis kampanye hitam yang diarahkan kepada Jokowi yakni dengan menghadirkan kampanye kreatif. Relawan yang tergabung dalam *Generasi Optimis* mengunggah film animasi tentang serangan makhluk asing di Candi Suku, guna menunjukkan dukungan pada Jokowi. Tak hanya film animasi, relawan yang terhimpun di *Generasi Optimis* juga mengkreasi game, meme atau gambar plesetan lucu, musik, bahkan materi kampanye untuk para relawan yang membutuhkannya. Selain itu, ada juga online shop yang menjual barang-barang yang berkaitan dengan Jokowi-JK dengan desain menarik khas anak muda (Samah & Susanti, 2011).

Dalam ensiklopedi ilmu politik memang belum dikenal istilah kampanye kreatif, sebab selama ini hanya dikenal 3 jenis istilah kampanye yakni kampanye positif (*positive campaign*), kampanye negatif (*negative campaign*), dan kampanye hitam (*black campaign*). Adapun kampanye positif lebih mengedepankan kata-kata hiperbolis yang bertujuan mengenalkan calon pemimpin atau presiden secara pribadi, baik program kerja dan visi misinya. Kampanye negatif, yakni kampanye yang memberikan berbagai informasi negatif berisikan pesan-pesan negatif terhadap lawan politik dengan berdasarkan fakta yang jujur dan relevan terutama soal kapasitas, kapabilitas, skandal dan rekam jejak kandidat politik tersebut.

Keberadaan media sosial berperan penting dalam mendorong demos untuk mewujudkan sebuah kesetaraan, partisipasi, serta voluntarisme. Kesadaran para relawan politik jika pertarungan di dunia maya tidak terhindarkan dari aksi saling bully maupun perang posting di jejaring sosial, seperti facebook, twitter, dan youtube membuat relawan untuk mengedepankan kampanye politik yang kreatif (Arianto, 2014). Hal ini sejalan dengan apa

yang diutarakan Gramsci (1971) sebagai war of position, sebagai gelanggang pertarungan untuk memenangkan hegemoni menjadi kenyataan.

Yogi Arief Nugraha (wawancara, 18 Maret, 2024) menyatakan relawan politik berperan penting dalam menglorifikasi nama Jokowi di sosial media. Kebetulan pada Pilpres 2014 merupakan tahun awal *digital disruption*.

Keberadaan Obor Rakyat membuat relawan Jokowi-JK sadar bahwa kreativitas kampanye di media sosial tak cukup untuk menggalang dukungan bagi Jokowi. Relawan Jokowi-JK seolah tak siap menghadapi serangan fitnah yang disusun secara sistematis, dengan memanipulasi sentimen ideologis, dan diterjunkan langsung ke target-target yang memang merupakan basis pendukung Jokowi-JK.

Keberhasilan serangan Obor Rakyat terbukti efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 15 Juni 2014, menunjukkan selisih elektabilitas antara Jokowi dan Prabowo kian mengecil menjelang Pemilu Presiden. Selisih di antara kedua Capres hanya sekitar 6 persen. Dari hasil survei LSI, elektabilitas Jokowi sebesar 45 persen dan Prabowo sebesar 38,7 persen per Juni Tahun 2014. Survei yang digelar Indo Barometer juga menunjukkan hal serupa. Bahkan elektabilitas Jokowi mengalami penurunan. Dalam survei 16-22 Juni 2014 elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan hingga 42,6 persen, sementara Jokowi masih berada di angka 46 persen dan mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya padahal pada Tanggal 9 Juli Tahun 2014 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan.

Di tengah sisa-sisa waktu menjelang pemungutan suara, relawan Jokowi-JK berusaha menghadang dampak Obor Rakyat dengan menerbitkan tabloid tandingan. Bukan tabloid yang berisi serangan balik terhadap kudu lawan, melainkan tabloid yang “menjawab” fitnah yang dilakukan Obor Rakyat tentang Jokowi.

Tabloid tersebut diberi nama Pelayan Rakyat. Bercover depan karikatur Jokowi yang sedang blusukan di pasar Yogyakarta. Bagian pertama hingga ketujuh Pelayan Rakyat berurut-turut diberi judul “Rakyat Biasa Jadi Presiden Indonesia”, “Ke-Islaman Jokowi Tak Diragukan”, “10 Alasan Mengapa Memilih Jokowi”, “Capres Boneka? Ayo Lihat Faktanya”, “Cerita Lucu Jokowi”, “Jokowi ‘Disandera’ Asing?”, dan “Prestasi Menjadi Walikota & Gubernur”.

Tabloid Pelayan Rakyat hanya terbit sekali. Pada 5 Juni 2014 dicetak sebanyak 20.000, kemudian diperbanyak menjadi 100.000 dan disebar ke pesantren-pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terutama pesantren yang terpapar sebaran tabloid Obor Rakyat.

Selain Pelayan Rakyat, sejumlah tabloid lain juga terbit untuk menangkal fitnah yang dilontarkan Obor Rakyat. Salah satunya adalah tabloid Obor Rahmatan Lil’Alamin. Tabloid lain yang ikut dalam menetralsir gagasan yang liar di tengah masyarakat yakni “Tabloid Jokowi-JK adalah kita”.

Dukungan relawan itu adalah berkah bagi Jokowi. Yogi Arief Nugraha (wawancara, 18 Maret, 2024) menyatakan dalam hal penggiringan isu, relawan politik cukup efektif dibandingkan dengan Partai Politik. Hal ini yang membuat Jokowi tidak perlu sibuk menebar citra dan berkampanye di media massa atau pasang iklan di televisi untuk menggenjot pamornya. Jokowi hanya perlu turun gunung menyapa rakyat sekaligus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi memang tak mengandalkan pencitraan, alasannya tak punya uang untuk membayar iklan televisi yang mahal. Selain itu Jokowi juga bukan pengusaha media yang tentu saja tidak bisa menggerakkan pembentukan opini publik (Projo, 2017).

Kehadiran relawan politik sebagai fenomena pengorganisasian tanpa organisasi lahir akibat kembalinya politik identitas pada Pilpres 2014. Masifnya kampanye hitam yang menggunakan isu SARA juga menjadi penyulut aksi relawan politik untuk semakin berjuang (Hanif, 2007).

Munculnya Jokowi pada Pilpres Tahun 2014 yang memiliki kesan “ndeso”, sederhana dan merakyat membuat orang mulai berani memiliki harapan bahwa politik Indonesia nantinya bukan sekedar berujung uang tetapi perubahan. Harapan ini yang menggerakkan para relawan mau untuk turun tangan menepis segala jenis isu negatif dalam bentuk kampanye hitam yang ditujukan kepada Jokowi-JK. Dukungan dalam menepis isu negatif tidak hanya datang dari relawan saja, melainkan koran nasional the Jakarta Post juga mengambil bagian dalam menyatakan sikap politik untuk mendukung Jokowi. Sikap politik the Jakarta Post ini diambil di tengah pemberitaan media-media televisi yang berpihak kepada salah satu calon, yang meninggalkan prinsip dasar jurnalisme soal akurasi dan keberimbangan. The Jakarta Post juga khawatir akan meledaknya konflik horizontal yang dipicu sentimen SARA pasca beredarnya tabloid Obor Rakyat.

Aktivitas Relawan Politik Sesudah Kontestasi Presidensial dan Dalam Masa Pemerintahan Jokowi

A. Rekrutmen Jabatan Publik

Keberhasilan relawan politik mengantarkan Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ketujuh merupakan awal dari perjuangan para relawan dalam upaya pelembagaan demokrasi partisipatoris. Sebagai gerakan politik, tujuan dan tugas relawan politik telah tercapai. Relawan politik telah mampu memenangkan pasangan Jokowi-JK sekaligus menegaskan social movement dapat menciptakan suasana politik dan kebudayaan yang lebih baru (Klinken, 2014). Tetapi, pekerjaan para relawan politik sebagai gerakan sosial baru dimulai. Apakah cita-cita setiap masyarakat yang tergabung secara sukarela di dalam barisan relawan politik dapat terwujud untuk merubah budaya pragmatisme politik dan semua turunannya menjadi budaya voluntarisme dalam langgam politik Indonesia.

Peningkatan fenomena kerelawanan sudah mulai tampak hadir ketika Jokowi-JK akan menyusun kabinet pemerintahan, para relawan politik Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Center dan Radio Jokowi mencoba ritual baru dengan mengajak publik untuk sama-sama memberikan usulan nama para Menteri yang pantas mengisi kabinet kerja Jokowi-JK. Para relawan politik bahkan memberi tiga pilihan nama dari setiap pos Menteri untuk dipilih dan hasil polling tersebut diunggah di situs www.jokowicenter.com dan disebarluaskan melalui media massa dan media sosial (Teresia, 2014).

Beredarnya usulan nama Menteri melalui polling Menteri untuk 34 posisi yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR), menjadi penanda penting akan peningkatan gairah partisipasi publik. Usulan kabinet versi rakyat diharapkan mampu mengajak rakyat untuk memiliki kesempatan yang panjang dalam menilai aspek kepantasan calon Menteri baik dari sisi integritas, moralitas, dan kapabilitas. Hal ini sebagai upaya membangun kontrak sosial yang akan mendasari praktik voluntarisme rakyat dengan menyerahkan kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing individu (Hanif, 2007). Langkah ini ditujukan untuk menghindari pola-pola transaksional dan politik dagang sapi. Sebab, selama ini ritual bagi-bagi kursi Menteri dan posisi strategis di pemerintah menjadi sebuah keharusan dalam politik balas jasa.

Pada 20 Oktober 2014 Joko Widodo - Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejumlah harapan, sekaligus tantangan ditumpukan

kepada keduanya oleh masyarakat Indonesia. Salah satu harapan dari pemerintahan Jokowi adalah terciptanya sebuah zaken kabinet, sesuai dengan langkah Jokowi yang awalnya akan melibatkan masyarakat dalam memberikan usulan kabinet sebagai bentuk kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Pembentukan zaken kabinet yang berisikan Menteri non-parpol dan parpol yang berorientasi pada integritas, moralitas, dan kapabilitas dapat di terapkan di sistem pemerintahan Indonesia yakni presidensial, karena dalam sistem presidensial Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung bukan berdasarkan dukungan Partai Politik di parlemen.

Terlepas dari harapan masyarakat, Jokowi tidak dapat menghindari politik akomodasi atau politik balas jasa. Hal ini terlihat dari “pemberian” posisi strategis di pemerintah kepada anggota Tim 11. Tim 11 dibentuk langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri guna memberikan masukan dan nasihat kepada Megawati sebelum ia mengambil sebuah keputusan strategis, terutama terkait dengan Pemilu Tahun 2014. Kesebelas orang di Tim 11 ialah : (i) Prananda Prabowo (DPP PDIP), (ii) Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP), (iii) Cornelis Lay (UGM), (iv) Ari Dwipayana (UGM), (v) Hariadi (Unair), (vi) Muradi (Unpad), (vii) Andi Widjajanto (UI), (viii) Jaleswari Pramodhawardai (LIPI), (ix) Teten Masduki (aktivis anti-korupsi), (x) Sumaryo (konsultan marketing communication), dan (xi) Alexandra Retno Wulan (peneliti).

Atas kerja kerasnya, beberapa anggota Tim 11 mendapatkan posisi strategis di pemerintah. Andi Widjajanto menjadi Sekretaris Kabinet. Teten Masduki, diangkat sebagai staf khusus sekretaris kabinet yang selanjutnya menjadi Tim Komunikasi Presiden dan kemudian diangkat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Jaleswari Pramodhawardai, mendapat jabatan sebagai Staf Khusus Sekretariat Kabinet. Sementara Ari Dwipayana memperoleh jabatan sebagai Staf Khusus di Sekretariat Negara. Hariadi dan Muradi mendapat kursi di BUMN Brantas Abipraya dan Lembaga Elektronika Nasional (Agustino, 2015).

Tidak hanya itu, beberapa elit relawan politik yang aktif dalam kemenangan Jokowi-JK pun mendapat bagian untuk duduk di kursi BUMN. Relawan pasangan Jokowi-JK terdiri dari banyak simpul mulai dari Pro-Jo, Tim Cemara 19, Seknas Jokowi, Bara JP, Duta Jokowi, Jasmev, dimana seluruh elit dari relawan politik tersebut mendapat kursi Komisaris BUMN.

TABEL 1.2 Elit Relawan Jokowi-JK di Kursi BUMN

No	Nama	Latar Belakang	Posisi
1	Revrison Baswir	Tim Cemara 19	Komisaris BNI
2	Nick Nurrachman	Tim Cemara 19	Komisaris Independen WIKA
3	Sonny Keraf	Tim Cemara 19	Komisaris Independen BRI
4	Cahaya Dwi Rembulan	Projo	Komisaris Independen Bank Mandiri
5	Hilmar Farid	Seknas Jokowi	Komisaris Independen Krakatau Steel
6	Margiyono Darsa Sumaja	Seknas Jokowi	Komisaris Independen Telkom
7	Roy E. Maningkas	Bara JP	Komisaris Krakatau Steel
8	Sony Subrata	Jasmev	Komisaris Semen Indonesia

Sumber : Olahan data peneliti, 2024

Pada awalnya Jokowi berusaha untuk menghindari politik transaksional, namun masalah itu tidak dapat dihindari. Akibatnya, pertama, Jokowi memperpanjang budaya politik balas jasa yang selalu dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Dengan kata lain, Jokowi belum bisa keluar dari perangkap politik balas jasa. Kedua, akibat lemahnya posisi Jokowi, maka Jokowi seperti tersandera oleh perangkap kelompok oligarki yang mendukungnya untuk menjadi Presiden. Ketiga, Jokowi menjadi mudah dimobilisasi terutama oleh kepentingan Partai Politik, relawan, dan elit tertentu (Agustino, 2015).

Leo agustino (wawancara, 08 Maret, 2024) menyatakan pada awalnya masyarakat menilai relawan politik hanyalah orang yang tulus mendukung Jokowi tanpa iming-iming apa-apa. Tetapi apabila kita lihat lebih jauh pada dasarnya elit relawan politik ada orang Partai Politik yang telah mengkalkulasi itu semua. Sehingga ketika mereka telah mengantarkan seseorang ke kursi kekuasaan maka para elit relawan politik akan terus meminta posisi tertentu di kekuasaan.

Dengan diberlakukannya politik akomodatif oleh Jokowi kepada relawan politik, membuat akses pada kekuasaan dan sumber daya menjadi insentif baru untuk relawan politik. Relawan politik yang pada awalnya lahir atas kejenuhan praktik-praktik klientelistik atau yang dikenal patronase menjadi bias. Akses yang dinikmati relawan politik pada kekuasaan menjadi alasan cukup kuat bagi elit-elit relawan politik untuk terlibat lebih dalam pada arena politik praktis tanpa perlu berkontestasi secara elektoral layaknya Partai Politik.

Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Jendral Pro-Jo, kelompok relawan terbesar Jokowi. Dalam pernyataannya Handoko (wawancara, 07 November, 2023) mengatakan faktanya dan sejarahnya relawan bisa sebagai pijakan untuk mengisi jabatan publik, kita juga jangan bilang bahwa relawan itu diisi oleh orang yang tidak punya kapabilitas dan kompetensi. Dan bagi Presiden ini penting, untuk memastikan instrumen dibawah beliau diisi oleh orang-orangnya beliau.

Politik akomodatif Jokowi kepada relawan politik tidak berhenti pada Pilpres Tahun 2014, pasca Pilpres Tahun 2019 elit relawan politik Pro-Jo kembali mendapatkan posisi strategis di pemerintahan. Sekretaris Jendral Pro-Jo mendapatkan posisi sebagai Tenaga Ahli Madya Kedeputusan IV Kantor Staf Presiden yang membidangi informasi dan komunikasi politik (Fajri, 2023). Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pro-Jo Panel Barus juga mendapatkan posisi sebagai Komisaris Independen PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (Persero) (Tjitra, 2023).

Tidak berhenti pada Sekretaris Jendral dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pro-Jo, Budi Arie Setiadi yang merupakan ketua umum Pro-Jo juga menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi. Pada tanggal 25 Oktober 2019, Budi Arie Setiadi diangkat menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kemudian diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dengan dibukanya akses dan sumber daya kekuasaan kepada kelompok relawan politik menjadikan relawan politik berlomba menjual narasi sebagai kelompok yang memiliki legitimasi politik paling kuat untuk mengatasnamakan diri sebagai representasi Jokowi. Akomodasi gerakan relawan politik yang berlebihan akan menciptakan disinsentif politik kepartaian. Untuk mendapatkan ceruk kekuasaan, orang akan mencari cara-cara non-parlemen dengan menjual klaim tanpa bertarung pada politik elektoral yang sehat (Suryahudaya, 2023).

Aditya Perdana (wawancara, 14 Maret, 2024) menyatakan ketika berbicara relawan politik harus dibedakan, apakah relawan tersebut berbasiskan voluntarisme atau relawan tersebut berbasiskan partisan. Ketika relawan tersebut partisan atau berpihak pada calon tertentu

maka perspektif relawan tersebut akan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan calon tertentu. Jadi jangan berharap kelompok relawan yang partisan akan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Arena voluntarisme tentulah tidak tepat bilamana menggunakan perspektif pragmatis. Namun semakin tingginya popularitas dan kekuatan gerakan relawan dalam demokrasi elektoral, sulit menjaga arena ini tidak menghadirkan partisipasi yang bentuknya atas pesanan atau wujud mobilisasi yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan (Roth, 2009) bahwa keberadaan sifat alami manusia yakni self-interest axiom dimana sifat alami ini berpotensi memunculkan perilaku partisipasi dan keberpihakan kepada peserta pemilihan umum berdasarkan yang mampu menjanjikan keuntungan bagi dirinya.

Dian Permata (wawancara, 03 Januari, 2024) menyatakan bahwa yang dilakukan Jokowi sama saja dengan mengkerdikan demokrasi dan Partai Politik ada di dalamnya. Hal ini merusak sistem politik di Indonesia yang menciptakan rumusan baru bahwa untuk menjadi Menteri tidak perlu lewat Partai Politik. Yang kita pahami hanya ada dua jalur untuk menduduki kursi Menteri pertama jalur Partai Politik dan yang kedua jalur profesional.

Kehadiran gerakan relawan politik yang semula bersifat otonom sebagai bentuk partisipasi aktif civil society telah dibelokkan oleh Jokowi menjadi aktivitas politik pragmatis kepentingan elit relawan politik. Secara tidak sadar loyalitas para relawan terhadap kegiatan kesukarelawanan dikaburkan. Fenomena menjadikan relawan politik sebagai pijakan untuk mengisi jabatan publik mempertontonkan bagaimana sulitnya menjaga marwah nilai-nilai voluntaristik manakala kepentingan elit politik telah menyusup kedalam gerakan relawan politik.

B. Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Melihat peran dan implikasi dari relawan politik yang ikut dalam lingkup institusi pemerintahan Jokowi, menjelaskan bahwa relawan politik tidak saja sebagai tim sukses semata melainkan juga turut membangun kelancaran dan kesuksesan pemerintahan Jokowi. Hal ini yang menjadi alasan para elit relawan politik mau menerima jabatan publik dalam pemerintahan Jokowi.

Adapun beberapa argumentasi yang dibangun para elit relawan politik dalam menerima jabatan publik di pemerintahan Jokowi. Pertama, relawan politik ingin membuktikan bahwa para relawan bukan hanya berjuang untuk memenangkan Jokowi, tetapi lebih dari itu yakni turut mengawal agenda Nawacita. Kedua, bertujuan untuk membenahi dari berbagai kepentingan yang selama ini menggerogoti kinerja dan pendapatan BUMN. Pembenahan ini meliputi pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia serta mengikis mental proyek yang seringkali mendominasi banyak BUMN (Arianto, 2016).

Pro-Jo sebagai salahsatu relawan politik yang bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) menetapkan tiga orientasi politik utama yakni memperjuangkan Jokowi menjadi Presiden, memenangkan Jokowi menjadi Presiden, dan mengawal Jokowi sebagai Presiden. Dua dari tiga orientasi politik Pro-Jo telah tercapai dan hanya satu orientasi politik Pro-Jo yang belum tercapai yakni mengawal Jokowi sebagai Presiden (Projo, 2017).

Untuk mencapai orientasi politik itu, pada 13 Februari 2015 Projo menggelar konsolidasi dan mendeklarasikan manifesto "Kawal Nawacita". Seperti manifesto-manifesto lainnya, Surat Kepercayaan Gelanggang (1950) oleh sekelompok sastrawan Indonesia, Manifesto GNU (1985) oleh Richard Stallman, Manifesto Hacker (1986) oleh The Mentor dan manifesto politik tahun 1952 di Indonesia. Manifesto "Kawal Nawacita" merupakan

pernyataan sikap, seruan, atau pun pernyataan politik yang dimaksudkan demi menjaga keutuhan NKRI dan masa depan bangsa Indonesia (Projo, 2017).

Bagi Pro-Jo, manifesto “Kawal Nawacita” merupakan kesadaran kritis Pro-Jo dalam mengawal Nawacita, seperti terlihat dalam isi manifesto berikut :

Gambar 1. Manifesto Kawal Nawacita

MANIFESTO KAWAL NAWACITA

Dalam beberapa waktu terakhir kita melihat kekuatan politik ini, yakni pemerintahan Jokowi, mendapat serangan dari berbagai pihak karena keputusan yang dinilai kontroversial di sekitar pemilihan pejabat teras Negara.

Kritik terhadap keputusan yang spesifik kini bergulir menjadi serangan terhadap pemerintahan secara umum, termasuk terhadap jalan perubahan tersebut diatas. Perkembangan ini menuntut kami, PROJO, untuk bersikap :

1. Kami setuju bahwa masih ada berbagai kekurangan dalam pelaksanaan agenda perubahan, tapi kami tetap teguh berpendapat bahwa jalan perubahan yang termaktub dalam Nawacita itu tepat adanya. Pelaksanaan Nawacita secara konsekuen akan membawa Indonesia pada jalan perubahan.
2. Kami sadar bahwa kerja pemerintahan Jokowi dalam pelaksanaan Nawacita belum sempurna karena menghadapi silang-sengkarut kepentingan bisnis dan politik. Kami sepenuhnya mendukung langkah pemerintahan Jokowi untuk memotong silang-sengkarut itu dengan terutama memperkuat pemerintahan dengan cara melepas unsur yang tidak kompeten dan/atau tidak sehaluan, dan menempatkan unsur terbaik dari anak bangsa untuk mendukung kerja keras pemerintahan dalam mewujudkan agenda rakyat.
3. Kami sadar bahwa jalan perubahan tidak mungkin hanya diemban oleh pemerintah. Adalah tugas setiap warga yang setuju pada perubahan untuk mendukung setiap langkah perubahan dengan tindakan nyata. Partisipasi adalah kunci keberhasilan pelaksanaan Nawacita.

Sumber : DPP Pro-Jo

Manifesto “Kawal Nawacita” merupakan respon dari Pro-Jo atas situasi politik saat itu dan kondisi pemerintahan Jokowi-JK yang sedikit menghangat lantaran munculnya kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Konflik bermula saat komisi antirasuah menetapkan calon tunggal Kapolri, Komisar Jendral Budi Gunawan sebagai tersangka kasus kepemilikan rekening gendut. Tak ada maksud Pro-Jo ikut campur dalam konflik tersebut, saat itu Budi Arie Setiadi sempat mengatakan bahwa Pro-Jo sebagai relawan tetap berada pada barisan pendukung Jokowi dan menghormati keputusan apa pun yang diambil oleh Jokowi (Projo, 2017).

Selain itu, saat perdebatan di tengah masyarakat seputar RUU KUHP pada Tahun 2015 utamanya pada pasal penghinaan Presiden yang dianggap berpotensi menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah, Pro-Jo menjadi ormas yang terdepan dalam membela pemerintah untuk mengesahkan pasal tersebut. Pro-Jo menganggap bahwa dengan disahkan pasal tersebut, dapat menguatkan sistem presidensil dan merawat demokrasi Indonesia. Pro-Jo juga beranggapan RUU KUHP pada pasal penghinaan Presiden dapat menghindari pihak-pihak yang ingin membonsai demokrasi (Projo, 2017).

Relasi saling membutuhkan antara Jokowi dan relawan politik Jokowi dibenarkan oleh Yogi Arief Nugraha (Wawancara, 18 Maret, 2024) yang menyatakan Jokowi membutuhkan relawan politik untuk bekerja dalam mengamankan persepsi di publik yang berkaitan dengan survei.

Relawan politik sejatinya tidak hanya sebagai barisan pendukung Jokowi dan mengamini setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi. Relawan politik diharapkan dapat melakukan beberapa langkah taktis, diantaranya : (1) mempengaruhi (*influencing*) proses pelaksanaan kebijakan publik, (2) mengawasi (*monitoring*) proses pelaksanaan kebijakan publik, dan (4) memberikan bantuan dan pembelaan (*advocacy*) terhadap kelompok-kelompok yang dirugikan atas pelaksanaan kebijakan publik (Fikri, 1999).

Hal ini juga dibenarkan oleh Dian Permata (wawancara, 03 Januari, 2024) yang menyatakan sejatinya relawan politik bergerak dengan sukarela memenangkan sosok yang di dukung dan mengawasi kinerja dan janjinya. *Main Ground* relawan politik adalah demonstrasi, bukan kebijakan publik karena kebijakan publik merupakan *main ground* dari Partai Politik sehingga sejatinya elit relawan politik tidak layak untuk duduk di kursi jabatan publik.

Peran ganda yang diambil oleh relawan politik baik berperan sebagai pengawal agenda Nawacita sekaligus menjadi penerima jabatan publik dari pemerintahan Jokowi akan menjadi problematika. Sebab, kita pahami bersama bahwa tugas utama para relawan politik adalah meneliti sebab-akibat dari kinerja kebijakan dan program publik. Terutama, soal apakah suatu kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang atau hanya diputuskan sepihak untuk memenuhi kepentingan politik semata. Artinya, peran ganda ini akan menimbulkan dilema yang kemudian menjadi bumerang bagi masa depan relawan politik pendukung Jokowi.

Bumerang terhadap relawan mulai tercermin pada hasil survei Litbang Kompas pada 22-24 November 2022. Litbang Kompas (2022) melaporkan 41,3 persen responden menyatakan bahwa citra sukarelawan politik baik, sementara 39,7 persen menyatakan citra relawan buruk. Lebih lanjut, 68,5 persen responden menganggap keberadaan sukarelawan merupakan kelompok eksklusif dalam masyarakat. Citra tersebut juga tidak lepas dari penilaian masyarakat bahwa kerja sukarelawan masih mengharapakan imbalan hingga jabatan ketika tokoh yang didukung berkuasa.

Sejalan dengan pernyataan Yogi Arief Nugraha (wawancara, 18 Maret, 2024) setelah melihat penguatan relawan politik pada era kepemimpinan Jokowi, akhirnya kita menyadari gerakan volutarisme yang diakomodasi secara berlebihan menyebabkan pragmatisme melebihi Partai Politik. Sehingga pada akhirnya kita menyadari perlunya penguatan fungsi Partai Politik.

Oleh sebab itu, langkah taktis untuk meminimalisir dilema tersebut adalah dengan tetap mendorong nalar politik para relawan politik, terutama yang masih aktif untuk dapat tetap mengedepankan dan mendengarkan suara publik. Jika pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, maka para relawan dituntut berani mengkritik secara argumentatif, meskipun kebijakan itu dikeluarkan oleh para elit relawan politik yang duduk di pemerintahan Jokowi-JK (Arianto, 2016).

Sekretaris Jendral Pro-Jo Handoko (wawancara, 07 November, 2023) menyatakan Pro-Jo bukanlah *underbow* atau sayap partai, tidak berafiliasi dengan Partai Politik manapun. Memang Pro-Jo mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung Jokowi, tetapi pada dasarnya Pro-Jo independen. Pro-Jo mendukung Jokowi karena memiliki cita-cita politik yang sama, semangat akan kemandirian bangsa. Maka mendukung Jokowi adalah pilihan ideologis bagi

Pro-Jo. Pro-Jo meyakini pemimpin harus lahir dari rakyat itu sendiri, dan Jokowi manifestasi dari kepemimpinan itu sendiri. Maka ketika lahir pemimpin dari rakyat, Pro-Jo tidak bisa diam, tetapi ikut berdiri, menjaga dan membela Jokowi.

Salah satu wujud nyata relawan politik terus mengawal pemerintahan Jokowi yakni dengan mendirikan Forum Padamu Negeri pada masa awal pemerintah Jokowi di Tahun 2014. Adapun anggotanya yaitu para elit relawan politik yang mendapatkan kursi Komisaris BUMN, diantaranya : Hilmar Farid Komisaris Krakatau Steel (Seknas Jokowi), Dyah Kartika Rini Djoemadi Komisaris Danareksa (Jasmev), Teddy Wibisana Komisaris Waskita Karya (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat), Viktor Sirait Komisaris Waskita Karya (BARA JP), Margiyono Darsa Sumaja Komisaris Telkom (Seknas Jokowi), Sony Subrata Komisaris Semen Indonesia (Jasmev), Nick Nurrachman Komisaris Wijaya Karya (Tim Cemara 19), Michael Umbas Komisaris Hotel Indonesia Natour (Arus Bawah Jokowi), Arie Coerniadi Komisaris BTN (Pro-Jo). Forum ini bertujuan agar para komisaris yang berasal dari relawan politik yang ditugaskan Jokowi untuk dapat menjadi penjaga nawacita di tubuh BUMN (Arianto, 2016).

Relawan politik diupayakan oleh elit politik untuk masuk kedalam sirkulasi partisipasi politik aktif. Perluasan partisipasi yang terjadi bukan merupakan sebuah indikator semakin terlibatnya warga Negara dalam seluruh aspek kehidupan berpolitik, namun partisipasi tersebut dimaknai oleh elit politik sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Gairah partisipasi politik warga Negara tidak dapat dibiarkan seperti bola liar yang dapat membahayakan posisi elit politik. Cara halus untuk mengakomodir kepentingan partisipasi warga Negara adalah memberdayakannya, menggerakkannya dan memposisikan partisipasi tersebut berpihak pada kepentingannya. Lebih lanjut gerakan partisipasi ini dipastikan bergerak pada sebuah koridor tertentu yang ditetapkan oleh elit politik untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan elit politik.

V. Penutup

Kegiatan kesukarelawanan dalam konteks politik elektoral sejatinya sangat mudah tergelincir kedalam kepentingan pragmatis telah dibahas pada bab awal penelitian ini, fakta yang terungkap bahwa agenda relawan politik dalam gerakan kesukarelawanan hanya berhenti pada aktivitas relawan politik sebelum dan pada saat kontestasi presidensial, aktivitas relawan politik sesudah kontestasi presidensial dan dalam masa pemerintahan Jokowi hanya menjadikan relawan politik sebagai alat elit politik untuk mencapai kepentingannya.

Penelitian ini mengakui bahwa nilai-nilai kesukarelawanan tidak sepenuhnya hilang dalam konteks gerakan Pro-Jo. Fenomena Pro-Jo kiranya mampu dijadikan sebuah contoh bahwa dalam memandang dan memposisikan voluntarisme politik tidak sama halnya dengan voluntarisme dibidang sosial. Kegiatan sukarela menjadi bias dan sulit dipisahkan. Oleh karena itu, penelitian ini menyuguhkan sebuah gagasan lain tentang voluntarisme. Penelitian ini menggambarkan bagaimana sisi lain dari kegiatan kesukarelawanan dalam dunia elektoral, yang secara keseluruhan tidak bergerak atas wujud partisipasi yang otonom dengan didasarkan pada pengakuan kedaulatan sebagai warga Negara.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. (2015). Satu Tahun Pemerintahan Jokowi : Transaksional dan Transformasional. *Analisis CSIS*. 44(4). 385-400.

- Alam, M., Arditama, E., & Seftyono. (2017). *Religion, State and Society : Exploration of Southeast Asia*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Alexander, H. E. (1991). *Financing Politics: Money, Elections, and Political Reform*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Amato, P. (1990). Personality and social network involvement as predictors of helping behavior in everyday life. *Social Psychology Quarterly*. 53(1). 31-43.
- Arianto, B. (2014). Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 18(2). 146-162.
- Arianto, B. (2016). Menakar Peran Relawan Politik Pasca Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 20(1). 50-68.
- Bonica, Adam. (2017). Professional Network, Early Fundraising, and Electoral Success. *Election Law Journal*. 16(1).
- Clary et al, E. (1998). Understanding and Assesing The Motivations of Volunteers : A Functional Approach. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1516-1530.
- Fikri, Akhmad .(1999). *Menjadi Politisi Ekstra Parlementer*. Yogyakarta : LKIS.
- Finkelstein, M., & Brannick, M. (2007). Applying theories of Institutional Helping to Informal Volunteering : Motives, role identity, and prosocial personality. *Social Behavior and Personality*. 35(1). 101-114.
- Fisher, J., & Denver, D. (2009). Evaluating the Electoral Effects of Traditional and Modern Modes of Constituency Campaigning in Britain 1992-2005. *Parliamentary Affairs*. 62(2). 196-210.
- Fisher, J., Fieldhouse, E., & Cutss, D. (2014). Members Are Not the Only Fruit : Volunteer Activity in British Political Parties at the 2010 General Election. *British Journal of Politics and International Relations*. Vol. 16. 77-85.
- Gramsci, Antonio. (1971). Selection from the Prison Notebooks. Dalam Q. Hoare dan G. Nowell-Smith eds. New York : International Publisher.
- Hamdani, R., Herdiansyah, A.G., dan Bintari, A. (2021). Partisipasi Politik Pemuda dalam Pemilu; Studi Kasus tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Tasikmalaya, *Jurnal Aspirasi*. 11(2). 1-19.
- Hasrul, Hanif. (2007). Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan rantai Ekuivalensi : Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agnostik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1).
- Heryanto, Gun Gun. (2019). *Literasi Politik : Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hidayat, S. (2009). Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practice. dalam P. Sulistiyanto dan M Erb (ed). Singapore : ISEAS Publishing.
- Jati, W.R. (2016). Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial : Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 20(2). 147-162.
- Klinken. Gerry Van. (2014). *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi. Demokrasi Patronase Indonesia di Tingkat Provinsi*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

- Lay, C. (2017). The Emerging of New Democratic Space : CSOs and Parliament in Post-Soeharto Indonesia. *Power, Conflict and Democracy*. 5(1). 1-27.
- Levanthal, H. (2009). Altruism and Volunteerism : The Perception of Altruism in Four Dicipines and Theis Impact on The Study of Volunteerism. *Journal for The Theory of Social Behaviour*. 93(3). 271-299.
- Maharddhika. (2017). Mengatur Relawan Politik : Menegaskan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*. 9. 19-40.
- Mietzner, Marcus. (2014). Indonesia's 2014 Election. 2014. *Journal of Democracy*. 25(4). 111-125.
- Mowen, J., & Sujan, H. (2005). Volunteer Behavior : A Hierarchical Model Approach for Investigating Its Traits and Functional Motive Antecedents. *Journal of Consumer Psychology*. 15(2). 170-182.
- Pecnikova, J. (2016). Volunteering and Activism as Forms of Active (A Case Study). Diambil kembali dari University of Ljubljana Faculty of Social Sciences : <https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/pecnikova.pdf?sfvrsn=2>
- Penner, L. (2002). Dispositional and Organizational Infuneses on Sustained Volunteerism : An Interactionist Perspective. *Journal of Social Issues*. 58(3). 447-467.
- Projo, Tim & Rakyat Merdeka. (2017). Menjemput Takdir Sejarah. Jakarta : Semesta Rakyat Merdeka.
- Purboningsih, S.D. (2015). Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis : Relawan Politik dalam Pilpres 2014 di Surabaya, *Jurnal Review Politik*, 5(1), 101-125.
- Putra, G.A.P., Hertanto., dan Warganegara, A. (2022). Fenomena Relawan Politik dan Potensi Klientelisme Pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. *Perspektif*. 11(4). 1387-1393.
- Samah, K., & Susanti, R. F. (2011). Berpolitik Tanpa Partai. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suryahudaya, E.G. (2023, Oktober 19). Relawan Tanpa Kerelaan. Kompas. Diambil dari <https://www.kompas.id/>
- Syauket, A. (2022). Peran Relawan Politik dalam Konstelasi Politik Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*. 8(1). 47-56.
- Teresia, A. (2014, Juli 24). Susun Kabinet, Jokowi Minta Masukan Rakyat Via Facebook. Tempo. Diambil dari <https://pemilu.tempo.co/>
- Tjitra, Andry. (2023, November 10). Deretan Komisaris BUMN yang Bergabung di TKN Prabowo-Gibran. Tempo. Diambil dari <https://bisnis.tempo.co/>